

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

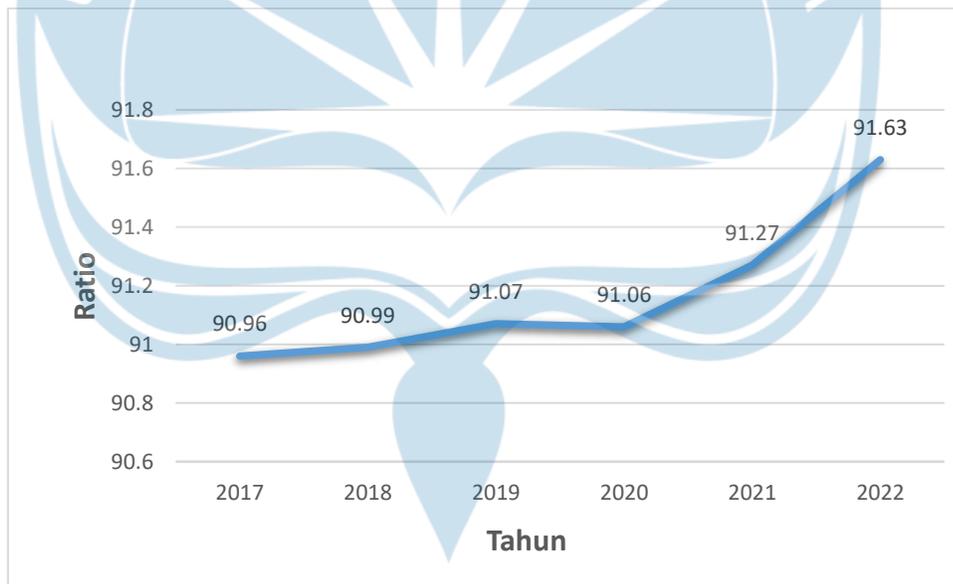
Gender dikonsepsikan sebagai suatu hirarki yang merujuk pada sistem peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, akan tetapi oleh lingkungan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Gender dijelaskan lebih lanjut dengan hubungannya terhadap kesetaraan yang biasa disebut dengan *gender equality*. Kesetaraan gender didefinisikan sebagai kondisi yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dalam menikmati status dan memiliki kondisi serta potensi yang sejajar untuk mengimplementasikan hak-haknya sebagai manusia dalam rangka memberikan kontribusi kepada pembangunan berbagai aspek meliputi nasional, politik, ekonomi.

Menurut Hubies (2010), realisasi kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya deskriminasi antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dalam kepentingan untuk memperoleh kesempatan mengakses fasilitas sosial, turut ambil partisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Ini selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Mulasari (2015) bahwa mengenai kontribusi di bidang pembangunan merupakan hak yang harus diterima oleh setiap individu yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesetaraan ini menjadi salah satu dimensi yang melandasi kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan indikasi bahwa masyarakat secara menyeluruh dapat menikmati hasil pembangunan tanpa ada yang dikecualikan. Lebih lanjut mengenai kenyataan bahwa setiap negara pastinya memiliki tujuan dan ambisi yang besar dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkorelasi kepada kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini disebutkan oleh Patel, *et al.* (2012) bahwa dalam kegiatan sosial maupun ekonomi, masyarakat yang sejahtera ditandai dengan kondisi di mana mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka. Kesetaraan gender laki-laki dan perempuan menurut Aktaria dan Handoko (2012) dianggap sebagai dimensi dasar dalam pembangunan manusia, karena pembangunan merupakan pencapaian yang adil dalam berbagai aspek baik dari etnis, angkatan generasi, jenis kelamin, bahkan wilayah menjadi hal yang penting di dalam proses pembangunan seperti salah satu kesepakatan bersama yang telah disetujui secara internasional atau global.

Pada kenyataannya, kesenjangan pembangunan gender masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dan terjadi ketimpangan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat jika ditinjau dari segi potensi wilayah dan kesediaan sumber daya manusia yang tersedia. Kondisi ini menjadi standar yang menunjukkan bahwa belum adanya pemerataan pembangunan manusia berbasis gender sehingga berlawanan dengan tujuan pembangunan di Indonesia yang berorientasi pada pemerataan hasil pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat (Widyadhana, *et al.*, 2016). Dalam masalah ini, pemerintah memiliki tanggung jawab dan harus mengambil langkah intervensi serius untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Pangurusutamaan Gender (PUG) pada setiap tahap pembangunan, terutama dalam proses perancangan kebijakan. PUG ini sendiri memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memperoleh akses yang sama dengan laki-laki dalam masa proses hingga hasil pembangunan nasional. Dengan kata lain, PUG memberikan peluang untuk

menyeimbangkan kepentingan yang dimiliki laki-laki dan perempuan agar kedua pihak sama-sama dapat memperoleh dan menikmati hasil pembangunan secara merata. Secara khusus peraturan yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan PUG diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Diterbitkannya Inpres ini telah menjadi langkah awal dalam pelaksanaan PUG di Indonesia (Martiany, 2011). Dengan didukung dan diperkuatnya kelembagaan PUG menjadi salah satu komponen penting dalam mewujudkan pembangunan kesetaraan gender di Indonesia (Ismail, et al., 2020). Adapun kondisi Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia dari tahun 2017 – 2022 ditunjukkan dalam grafik pada Gambar 1.1.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (Data diolah)

**Gambar 1.1 Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia Pada Tahun 2017 – 2022**

Berdasarkan Gambar 1.1, ditunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2017 hingga 2022, ratio Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia relatif mengalami kenaikan yang berkelanjutan. Capaian rata-rata tertinggi pada tahun 2022 yakni sebesar 91,63 dan sempat mengalami penurunan pada peralihan tahun 2019 ke tahun 2020 yakni dari angka 91,07 ke angka 91,06.

Di lingkup Asia Tenggara, Indonesia saat ini merupakan satu-satunya perwakilan negara ASEAN yang masuk ke dalam G20 dimana kriteria utama yang menjadikan Indonesia memenuhi kriteria dan standar adalah ukuran Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data terbaru dari *International Monetary Fund* (IMF) pada Oktober 2021, menempatkan Indonesia di posisi ke-16 dalam daftar negara dengan PDB terbesar di dunia dengan nilai PDB sebesar 1,15 triliun dolar Amerika Serikat (AS). Di sisi lain, Indonesia yang adalah negara berkembang dengan pendapatan menengah dan jumlah populasi penduduk yang sangat besar yakni mencapai lebih dari 273 juta jiwa, dan dengan fakta tersebut membuat Indonesia menduduki peringkat keempat berdasarkan jumlah penduduk terbesar di dunia dalam daftar (World Bank, 2022). Sedangkan dalam cakupan regional, beberapa wilayah di Provinsi di Indonesia memiliki angka pertumbuhan PDRB yang berbeda bahkan menunjukkan adanya ketimpangan yang besar. Berikut lebih lanjut ditunjukkan oleh Tabel 1.1 mengenai peringkat menurut pertumbuhan PDRB di 34 Provinsi di Indonesia.

**Tabel 1.1 Peringkat Menurut Pertumbuhan PDRB Provinsi di Indonesia**

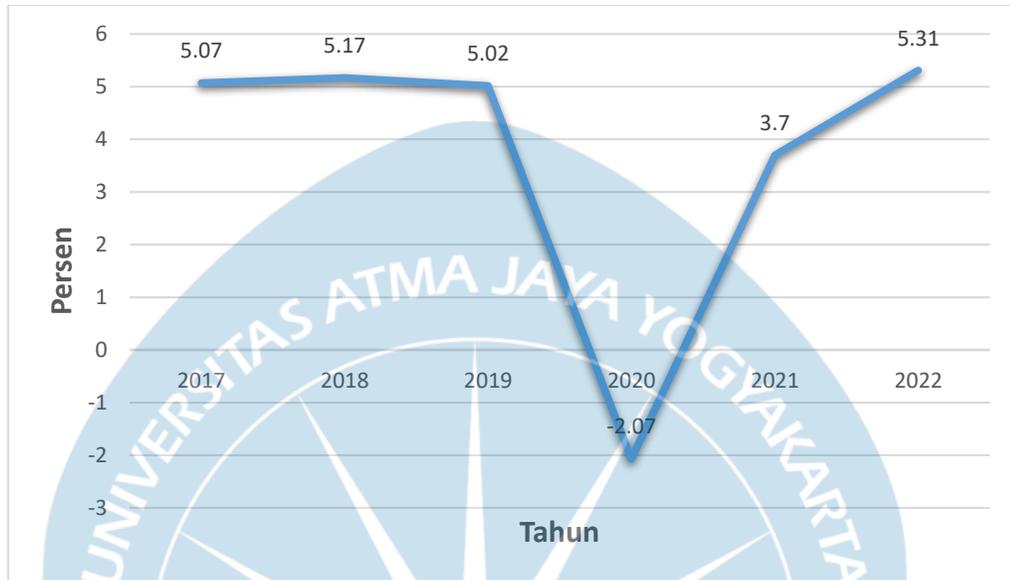
<i>Provinsi</i>	<i>Peringkat</i>	<i>PPDRB (Persen)</i>
<i>Maluku Utara</i>	1	22,94
<i>Sulawesi Tengah</i>	2	15,17
<i>Papua</i>	3	8,97
<i>Nusa Tenggara Barat</i>	4	6,95
<i>Kalimantan Tengah</i>	5	6,45
<i>Sulawesi Tenggara</i>	6	5,53
<i>Jawa Barat</i>	7	5,45
<i>Sulawesi Utara</i>	8	5,42
<i>Jawa Timur</i>	9	5,34
<i>Kalimantan Utara</i>	10	5,34
<i>Jawa Tengah</i>	11	5,31
<i>DKI Jakarta</i>	12	5,25
<i>Sumatera Selatan</i>	13	5,23
<i>DI Yogyakarta</i>	14	5,15
<i>Jambi</i>	15	5,13
<i>Kalimantan Selatan</i>	16	5,11
<i>Maluku</i>	17	5,11
<i>Kepulauan Riau</i>	18	5,09
<i>Sulawesi Selatan</i>	19	5,09
<i>Kalimantan Barat</i>	20	5,07
<i>Banten</i>	21	5,03
<i>Bali</i>	22	4,84
<i>Sumatera Utara</i>	23	4,73
<i>Riau</i>	24	4,55
<i>Kalimantan Timur</i>	25	4,48
<i>Kep. Bangka Belitung</i>	26	4,40
<i>Sumatera Barat</i>	27	4,36
<i>Bengkulu</i>	28	4,31
<i>Lampung</i>	29	4,28
<i>Aceh</i>	30	4,21
<i>Gorontalo</i>	31	4,04
<i>Nusa Tenggara Timur</i>	32	3,05
<i>Sulawesi Utara</i>	33	2,30
<i>Papua Barat</i>	34	2,01

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (Data Diolah)

Tabel 1.1 merupakan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan daftar peringkat menurut pertumbuhan PDRB di provinsi di Indonesia pada tahun 2022. Dari Tabel 1.1 tersebut tercatat bahwa provinsi Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan PDRB tertinggi di Indonesia tahun 2022 yakni sebesar 22,94%. Capaian ini ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pertumbuhan PDRB di tahun sebelumnya yang sebesar 16,79% pada tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, mencapai angka yang lebih rendah lagi yakni sebesar 5,39%. Dengan data tersebut setidaknya menempatkan provinsi Maluku Utara sebagai provinsi dengan pertumbuhan PDRB tertinggi dalam jangka 3 tahun terakhir secara berturut-turut. Kemudian, peringkat kedua disusul oleh provinsi Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan PDRB sebesar 15,17%, sedangkan di posisi ketiga adalah provinsi Papua dengan pertumbuhan PDRB sebesar 8,97%. Untuk provinsi dengan pertumbuhan PDRB terendah diduduki oleh provinsi Papua Barat yang hanya memiliki pertumbuhan PDRB sebesar 2,01%, juga ada provinsi Sulawesi Barat yang memiliki pertumbuhan PDRB sebesar 2,30% saja. Ini membuktikan bahwa masih terdapat ketimpangan yang jelas jika dilihat dari pertumbuhan PDRB tiap Provinsi di Indonesia. Ketimpangan ini menjadi bukti bahwa pembangunan belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan laporan dari *World Economics Forum* (WEF) yang merilis *Global Gender Gap Report* pada tahun 2022 mencatat bahwa Indonesia memperoleh skor indeks ketimpangan gender sebesar 0,697 dan menempatkan Indonesia di peringkat ke-92 dari 144 negara. Posisi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam negeri masih belum terpenuhi secara maksimal, yang berdampak pada situasi ketimpangan gender yang dialami oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Adapun

pertumbuhan PDRB di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022 ditunjukkan oleh Gambar 1.2.

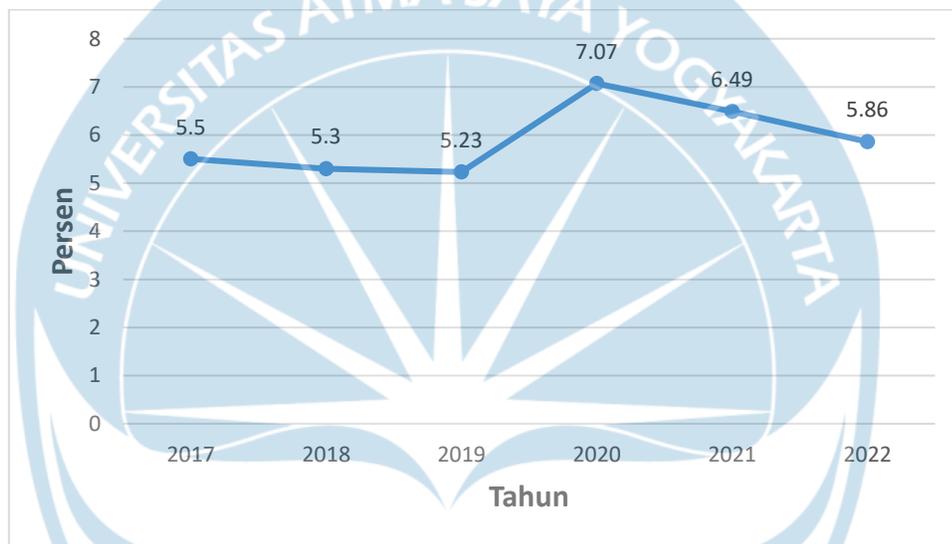


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (Data Diolah)

**Gambar 1.2 Grafik Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia Pada Tahun 2017 – 2022**

Berdasarkan Gambar 1.2, ditunjukkan bahwa terjadi fluktuasi capaian pertumbuhan PDRB dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 hingga 2019 capaian pertumbuhan PDRB menunjukkan nilai yang relatif stabil. Namun memasuki tahun 2020, capaian pertumbuhan PDRB mengalami kontraksi ke angka -2,07% sekaligus menjadi capaian PDRB terendah dalam 5 tahun terakhir. Kondisi ini besar dipengaruhi oleh kondisi pandemi *Covid-19* yang sudah memasuki sebagian besar wilayah di Indonesia dan mempengaruhi aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Capaian pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 5,31% sekaligus sebagai masa pemulihan pasca pandemi *Covid-19*.

Kondisi Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia dipengaruhi oleh perubahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat dalam aspek pengeluaran sebagaimana pengeluaran adalah bagian dari indikator komposit Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perubahan ini terjadi karena pandemi dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022 disajikan dalam Gambar 1.3.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (Data diolah)

**Gambar 1.3 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia Pada Tahun 2017 – 2022**

Berdasarkan Gambar 1.3, ditunjukkan bahwa terjadi fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 hingga 2019, kondisi pengangguran di Indonesia menunjukkan nilai yang relatif stabil. Namun memasuki tahun 2020, TPT mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni

di angka 7,07%, naik 1,84% dari capaian di tahun 2019 yakni sebesar 5,2%. Kemudian mengalami penurunan secara bertahap pada pertengahan 2020 hingga tahun 2022.

Pandemi *Covid-19* yang terjadi tentu saja membawa perubahan ke berbagai aspek dan tidak terlepas juga dari isu kesetaraan gender. Dampak wabah selalu berbeda antara kaum laki-laki dan perempuan. Patriarki dimaknai sebagai sistem struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai figur utama dalam suatu organisasi sosial termasuk dalam keluarga. Patriarki membentuk perbedaan status gender yang tidak setara di lembaga masyarakat. Sepanjang sejarah dalam konteks feminimisme, perempuan telah memperjuangkan kesetaraan, penghormatan dan persamaan hak dengan laki-laki. Bagi perempuan yang nilai patriarkalnya lebih dominan di ranah publik, tidak diragukan lagi ini menjadi tantangan tersendiri. Hal ini juga menimbulkan prasangka gender yang sering terjadi selama ini dan menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, misalnya di dunia kerja. Ketidaksetaraan gender diyakini telah memperburuk dampak pandemi *Covid-19* pada perempuan. *Rapid Gender Assesment* (RGA) yang dilakukan oleh *UN Women* di Eropa dan Asia Tengah menemukan bahwa lebih dari 15% perempuan menganggur, 41% upah perempuan turun, dan jam kerja serta beban kerja rumah tangga perempuan selama pandemi *Covid-19* telah ditambahkan. Pandemi *Covid-19* tidak hanya mempengaruhi ekonomi dan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Agustina, et al., 2021).

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penelitian ini menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap pembangunan gender menurut provinsi di Indonesia dari tahun 2017 – 2022.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka berikut ini rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini:

- 1) Bagaimana pengaruh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) di 34 Provinsi di Indonesia ?
- 2) Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) di 34 Provinsi di Indonesia ?
- 3) Bagaimana pengaruh dari adanya Pandemi *Covid-19* terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) di 34 Provinsi di Indonesia ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan di atas, maka berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

- 1) Memberikan Informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan dari faktor-faktor ekonomi, yaitu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan fenomena Pandemi *Covid-19* terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) di 34 Provinsi di Indonesia.
- 2) Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi dan gender di Indonesia.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan stakeholder lainnya dalam mengembangkan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan efisien

dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di 34 Provinsi di Indonesia.

- 4) Menambahkan *literature* atau referensi dalam penelitian di bidang ekonomi dan gender di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.
- 5) Sebagai sumbangan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang diadopsi oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), khususnya pada target 5.1 yang menekankan pada kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai dampak Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Pandemi *Covid-19* terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) di 34 Provinsi di Indonesia.
- 2) Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat membantu menambah informasi untuk mengambil keputusan dalam mengidentifikasi daerah-daerah yang mungkin membutuhkan perhatian khusus dalam hal pembangunan gender.
- 3) Bagi kepustakaan, digunakan sebagai acuan referensi atau *literature* tambahan bagi peneliti lain yang tertarik dalam penelitian serupa.

## **1.5 Hipotesis Penelitian**

Mengacu pada dasar pemikiran teoritis dan berdasarkan studi terkait, maka hipotesis yang hendak dibuktikan adalah sebagai berikut:

- 1) Diduga pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) di 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2017 – 2022.
- 2) Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) di 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2017 – 2022.
- 3) Diduga fenomena Pandemi *Covid-19* memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) di 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2017 – 2022.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I. Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II. Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Gender, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka, Pandemi *Covid-19* dan studi empiris sebelumnya.

### **BAB III. Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, objek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, variabel-variabel penelitian, dan teknik serta model data yang diteliti.

### **BAB IV. Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan hasil analisis data, hasil penelitian yang diuji, dan hasil interpretasi dari hasil data yang telah dianalisis.

### **BAB V. Penutup**

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran yang disampaikan baik untuk pemerintah maupun untuk objek penelitian selanjutnya.

